

Pemeriksaan lokasi bencana gerakan tanah Bagian 2: Tata cara pelaporan hasil pemeriksaan



Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Tata cara pelaporan hasil pemeriksaan.....	4
5 Format laporan hasil pemeriksaan	5
Bibliografi	6



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemeriksaan lokasi bencana gerakan tanah Bagian 2 : Tata cara pelaporan hasil pemeriksaan, disusun dengan tujuan untuk memberikan keseragaman format dalam pembuatan laporan.

SNI ini disusun oleh Panitia Teknik 96, Geologi dan Sumber Daya Mineral. Standar ini dirumuskan melalui beberapa kali rapat teknis, dan terakhir rapat konsensus yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, serta dihadiri oleh wakil-wakil dari instansi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan materi standar ini.



Pendahuluan

Laporan hasil pemeriksaan lokasi bencana gerakan tanah untuk masyarakat umum, instansi berwenang dan penentu kebijakan, merupakan informasi yang sangat diperlukan guna menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanggulangannya. Laporan hasil pemeriksaan bencana gerakan tanah harus memuat lokasi kejadian, penyebab terjadinya, mekanisme, jumlah korban, dan perkembangan kejadian serta rekomendasi upaya penanggulangannya. Laporan itu harus dibuat secara cepat, tepat serta mudah dimengerti. Oleh karena itu, untuk keperluan keseragaman dalam pembuatan laporan diperlukan suatu standar tata cara pelaporan hasil pemeriksaan yang akan menjadi acuan dalam membuat laporan.





Pemeriksaan lokasi bencana gerakan tanah Bagian 2: Tata cara pelaporan hasil pemeriksaan

1 Ruang lingkup

Standar ini merupakan tata cara pelaporan hasil pemeriksaan lokasi bencana gerakan tanah, yang mencakup informasi:

- a) lokasi kejadian,
- b) waktu kejadian,
- c) kondisi bencana gerakan tanah,
- d) kondisi dan jumlah korban,
- e) kondisi permukiman dan sarana,
- f) penyebab dan mekanisme terjadinya,
- g) perkembangan gerakan tanah,
- h) rekomendasi teknik penanggulangan untuk mengurangi, meniadakan dan rehabilitasi korban bencana gerakan tanah yang harus segera dilakukan.

2 Acuan normatif

SNI 13-6182-1999, *Legenda umum peta zona kerentanan gerakan tanah Indonesia skala 1: 100.000.*

3 Istilah dan definisi

3.1 bencana

rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau oleh keduanya, yang mengakibatkan jatuhnya korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat

3.2

gerakan tanah

perpindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan timbunan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke arah bawah dan keluar lereng

3.3

bencana gerakan tanah

peristiwa gerakan tanah yang diakibatkan oleh proses geologis dan/atau oleh ulah manusia, mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, serta mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat

3.4

lokasi bencana gerakan tanah

lokasi yang terlanda bencana gerakan tanah yang berisi informasi: nama, kampung/dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat terjadinya bencana gerakan tanah

3.5

pemeriksaan

penyelidikan guna mengetahui dimensi, penyebab, akibat, mekanisme, dan cara penanggulangan bencana gerakan tanah

3.6

bakornas PBP

(Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi)

wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden

3.7

satkorlak PBP

(Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi)

wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di propinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur

3.8

satlak PBP

(Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi)

wadah yang bersifat nonstruktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di kabupaten/kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota

3.9

satgas PBP

(Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi)

wadah yang menghimpun unsur-unsur operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di lapangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satlak PBP

3.10

waktu kejadian bencana gerakan tanah

waktu pada saat atau selama terjadinya gerakan tanah yang berisi informasi jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kejadian

3.11

korban bencana gerakan tanah

akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa gerakan tanah yang meliputi korban manusia, hewan ternak, rumah, bangunan, lahan pertanian, sarana dan prasarana lainnya yang hancur atau rusak

3.12

kondisi air

meliputi kondisi curah hujan, mata air, air permukaan (saluran air, genangan air, sungai), air bawah tanah, kedalaman muka air tanah, kondisi bangunan saluran air (terkikis, putus, bocor, tersumbat) sebelum dan selama terjadinya bencana

3.13

kondisi penggunaan lahan

keadaan pemanfaatan lahan pada saat dilakukan pemeriksaan

3.14**rekahan**

bukaan tanah yang merupakan gejala awal terjadinya gerakan tanah, dan dapat terjadi pada hampir semua jenis gerakan tanah

3.15**perkembangan gerakan tanah**

potensi terjadinya gerakan tanah susulan, arah gerakan tanah susulan beserta dampaknya, daerah yang aman dan tidak aman terhadap gerakan tanah susulan serta kelayakan permukiman/sarana prasarana dari ancaman bencana gerakan tanah susulan

3.16**tanggapan kejadian bencana gerakan tanah**

laporan awal atas peristiwa terjadinya bencana gerakan tanah

3.17**laporan singkat**

laporan yang memuat informasi secara singkat kejadian bencana gerakan tanah dibuat berdasarkan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan di lapangan

3.18**laporan akhir**

laporan rinci yang dibuat berdasarkan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan lokasi bencana gerakan tanah

3.19**rekomendasi teknis penanggulangan**

saran dan upaya mengurangi, meniadakan, merehabilitasi korban bencana gerakan tanah

3.20**analisis kemantapan lereng**

analisis hubungan antara tinggi lereng dan sudut lereng yang aman terhadap gerakan tanah

3.21**analisis dan evaluasi**

analisis dan evaluasi penyebab, mekanisme dan penanggulangan bencana gerakan tanah

3.22**mitigasi**

upaya mengurangi atau meniadakan korban bencana

3.23**kondisi bencana gerakan tanah**

penjelasan tentang kondisi gerakan tanah yang meliputi luas, posisi terhadap bukit (berada di lereng atas, tengah atau bawah) dan posisi permukiman terhadap lereng perbukitan

4 Tata cara pelaporan hasil pemeriksaan

Tata cara pelaporan hasil pemeriksaan meliputi tiga tahap yaitu:

- a) Tanggapan kejadian bencana gerakan tanah;
- b) Laporan singkat hasil pemeriksaan;
- c) Laporan akhir hasil pemeriksaan.

4.1 Tanggapan kejadian bencana gerakan tanah

Laporan pada saat dan setelah mendapat informasi terjadinya bencana gerakan tanah. Tanggapan ini dibuat oleh instansi/lembaga yang berwenang atau yang berkompeten kepada yang berhak menentukan kebijakan dalam penanggulangan bencana gerakan tanah.

4.2 Laporan singkat hasil pemeriksaan

Laporan awal hasil pemeriksaan gerakan tanah yang dibuat oleh instansi/lembaga berwenang atau yang berkompeten, disampaikan secepatnya kepada penentu kebijakan penanggulangan, yaitu kepada Gubernur / Ketua Satkorlak PBP di daerah propinsi, Bupati/Walikota/Ketua Satlak PBP di daerah kabupaten/kota, Camat/Ketua Satgas PBP, dan kepala kantor instansi/lembaga yang berwenang.

4.3 Laporan akhir hasil pemeriksaan

Laporan rinci hasil pemeriksaan bencana gerakan tanah yang dibuat oleh instansi yang berwenang atau yang berkompeten dan disampaikan secepatnya kepada penentu kebijakan penanggulangan, yaitu kepada: Gubernur / Ketua Satkorlak PBP di daerah propinsi, Bupati/Walikota/Ketua Satlak PBP di daerah kabupaten/kota, Camat/Ketua Satgas PBP, dan kepala kantor instansi/lembaga yang berwenang.

5 Format laporan hasil pemeriksaan

5.1 Format tanggapan kejadian bencana gerakan tanah

Format tanggapan memuat:

- a) lokasi;
- b) waktu kejadian;
- c) kondisi bencana gerakan tanah;
- d) korban bencana gerakan tanah;
- e) kondisi geologi lokasi bencana gerakan tanah;
- f) tindakan penanggulangan.

5.2 Format laporan singkat hasil pemeriksaan

Format laporan singkat hasil pemeriksaan memuat:

- a) lokasi bencana gerakan tanah;
- b) waktu kejadian bencana gerakan tanah;
- c) kondisi medan menjelaskan tentang: keterjangkauan lokasi, morfologi, dan kemiringan lereng;
- d) korban bencana gerakan tanah;
- e) kondisi bencana gerakan tanah menjelaskan tentang: jenis dan dimensi gerakan tanah, lokasi bencana gerakan tanah terhadap lereng (berada di lereng atas, tengah atau bawah);
- f) keairan;
- g) penggunaan lahan menjelaskan tentang jenis lahan, tata letak lahan, luas, perubahan tata guna lahan dan posisi permukiman;
- h) kondisi geologi di lokasi bencana gerakan tanah;
- i) analisis dan evaluasi;
- j) kesimpulan dan rekomendasi mitigasi bencana gerakan tanah;
- k) lampiran yang terdiri dari: peta/gambar; foto; tabel; dan grafik.dll.

5.3 Format laporan akhir hasil pemeriksaan lokasi bencana gerakan tanah

Daftar isi

Kata Pengantar

1. PENDAHULUAN
Berisi:
Latar belakang;
Lokasi daerah bencana;
Maksud dan tujuan;
Metodologi pemeriksaan;
Ruang lingkup ;
Peralatan dan personalia tim;
2. KONDISI LOKASI PENYELIDIKAN
Berisi:
Morfologi;
Penggunaan lahan;
Geologi;
Kegempaan;
Keairan;
Gerakan tanah;
3. ANALISIS DAN EVALUASI
Berisi:
Analisis kemantapan lereng;
Penyebab dan mekanisme terjadinya bencana;
Evaluasi penanggulangan bencana untuk mitigasi dan rehabilitasi korban bencana;
4. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

1. Peta situasi gerakan tanah
2. Tabel dan grafik analisis kestabilan lereng
3. Foto lapangan

Bibliografi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991: Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001, Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000, tentang Standardisasi Nasional

Undang Undang No.22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah











BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id